



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 805/III/2014

I/MARET 2014



UU Keinsinyuran: Beri Perlindungan Profesi Insinyur

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA MARET 2014

Laporan kegiatan AKD DPR-RI pada minggu pertama Maret 2014 berisi tentang hasil Rapat Paripurna 25 Februari 2014. Dilaporkan juga jumlah RUU yang berhasil diselesaikan DPR sampai 25 februari 2014. Berikut ringkasannya:

Rapat Paripurna 25 Februari

Rapat Paripurna 25 Februari 2014, mengagendakan: *pertama*, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran; *kedua*, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan Bangsa-Bangsa 2005); *ketiga*, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI; *keempat*, Penjelasan Wakil Pengusul Atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan *Outsourcing* di Perusahaan BUMN, dilanjutkan pengambilan keputusan.

Pada agenda *pertama*, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran, didahului dengan laporan Panitia Khusus yang disampaikan Ir. Rully Chairul Azwar Msi, tentang hasil pembicaraan tingkat I atas RUU ini. Ketua Pansus menyampaikan beberapa hal penting, yaitu: salah satu misi arah pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dengan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi luhur tersebut, perlu ada pengaturan yang bisa menjamin terwujudnya SDM yang berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang. DPR-RI berinisiatif untuk menyusun draf UU tentang Keinsinyuran yang sebenarnya sudah digagas oleh komunitas insinyur Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Akhirnya Baleg DPR-RI menetapkan RUU ini masuk dalam Prolegnas 2012.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Pertimbangan selanjutnya, bahwa profesi insinyur adalah salah satu profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan. Pengaturan tentang profesi ini diharapkan mampu mendorong lahir dan tersedianya sumberdaya keinsinyuran, yang tidak saja cukup secara kuantitas, namun juga handal dan profesional secara kualitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas insinyur Indonesia, pada gilirannya, mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Kehadiran UU ini mutlak dan penting, serta mendesak, dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

RUU ini terdiri dari 15 bab dan 56 pasal, dan pada Rapat Paripurna secara musyawarah disahkan untuk disetujui menjadi UU. Sambutan presiden diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda *kedua*, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan Bangsa-Bangsa 2005). RUU ini merupakan prakarsa pemerintah yang ditangani oleh Komisi I sejak 8 juli 2013, dan pembahasan mulai 15 Januari 2014.

Pembahasan terhadap RUU ini berlangsung secara kritis mendalam serta terbuka. Pertimbangan atas lahirnya UU ini antara lain adalah, terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena pelakunya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme mampu menciptakan rasa takut masyarakat. Salah



satu metode efektif menebar teror dan luka fisik maupun nyawa, adalah dengan metode pemboman. Dalam banyak kasus, pemboman memiliki dampak yang masif dan meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Penyalahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku teror akan berakibat fatal, karena metode pemboman dilakukan penambahan materi lain atau ditambahkan zat radio aktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Dalam pengawasannya, tidak mungkin penggunaan nuklir hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi institusi dan lembaga tersebut harus berkoordinasi bekerjasama, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak berbahaya bagi kehidupan. Hal inilah yang mendasari pembentukan dan perumusan *international Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*.

Konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir. Dalam konvensi dirumuskan daftar kegiatan yang dilakukan setiap orang yang diklasifikasikan sebagai terorisme nuklir, yang merupakan tindakan kriminal. Secara singkat dikatakan bahwa seseorang dimasukkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme, jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak fasilitas nuklir atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.

Dalam proses pembahasan antara Komisi I DPR-RI dan Pemerintah, ada beberapa pandangan yang perlu disampaikan dalam pernyataan dan persyaratan, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah untuk implementasi UU ini, antara lain, tidak serta merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada di atas hukum internasional Indonesia, sehingga segala upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan tindakan aksi terorisme nuklir dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

UU ini terdiri dari 2 pasal, namun

salinan naskah asli *Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, dengan *declaration* (pernyataan) terhadap pasal 4 dan *reservation* (persyaratan) terhadap pasal 23 ayat 1 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dilampirkan dalam naskah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini. Rapat paripurna memberikan persetujuan, dan sambutan Presiden dalam Pembicaraan Tingkat II diwakili Menteri Luar Negeri.

Agenda ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI. Beberapa anggota dari fraksi-fraksi mempertanyakan mengenai materi atas perubahan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK yang disiapkan oleh Baleg DPR-RI. Anggota juga mengusulkan, kiranya dalam penyusunan draft RUU ini, untuk menjadi RUU DPR harus melibatkan Komisi terkait, yaitu Komsii XI dan BAKN. Atas pendapat beberapa anggota fraksi-fraksi tersebut, akhirnya Rapat Paripurna memutuskan bahwa pengambilan keputusan atas RUU Inisiatif Baleg terhadap RUU BPK ini ditunda untuk memberikan kesempatan Komisi terkait untuk ikut dalam pembahasan.

Agenda keempat, Penjelasan Wakil Pengusul atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan *outsourcing* di Perusahaan BUMN. Sebelum pengusul memberikan penjelasan atas usulnya kepada Rapat Paripurna Dewan, anggota DPR dari Fraksi Demokrat lebih dulu menyampaikan bahwa sebaiknya masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan *outsourcing* di perusahaan BUMN ditangani oleh Komisi IX. Kemudian, beberapa anggota dari Fraksi PAN, PKB, dan PPP, juga meminta bahwa supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki di tahun politik, sementara permasalahannya harus tuntas, maka sebaiknya Komisi terkait mengundang Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan terhadap masalah ini. Kemudian apabila penjelasannya tidak memuaskan, maka baru interpelasi tetap berjalan. Akhirnya Rapat Paripurna memberikan kesempatan lebih dulu kepada pengusul untuk membacakan penjelasan tentang usul interpelasi kasus ketenagakerjaan.

Pengusul mengatakan bahwa, usul interpelasi ini dikeluarkan karena sejak dikeluarkannya rekomendasi Panja *outsourcing* BUMN Komisi IX bulan Oktober 2013, respon menteri terkait pada jajaran Pemerintahan dan jajaran Direksi BUMN secara tegas menyatakan untuk tidak menjalankan rekomendasi Panja tersebut dan menyatakan, secara publik bahwa rekomendasi tersebut merupakan produk politik. Mereka menambahkan bahwa produk politik tidak layak seperti produk hukum yang harus langsung dipatuhi. Pernyataan tersebut adalah sikap yang sangat merendahkan martabat Dewan. Oleh karena itu, beberapa anggota berpraktis mengajukan hak interpelasi yang dimotori oleh Dr. Poempida Hidayatullah.

Setelah mendengarkan penjelasan pengusul, Paripurna mengambil keputusan bahwa hak interpelasi belum dapat dilakukan, karena Dewan akan meminta Komisi IX untuk lebih dahulu mengundang Menteri BUMN memberikan penjelasan. Kehadiran Menteri BUMN dalam Raker diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Prolegnas Prioritas Tahun 2014

Tahun 2014, sampai tanggal 25 Februari 2014, telah diselesaikan 5 RUU, yaitu 2 RUU prioritas dan 3 RUU Kumulatif Terbuka. Dua RUU Prioritas Prolegnas adalah RUU tentang Perdagangan (disetujui UU pada Rapat Paripurna tgl. 11 Februari 2014) dan RUU tentang Keinsinyuran (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 25 Februari 2014).

Tiga RUU Kumulatif Terbuka adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindakan Pidana Terorisme Nuklir (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 25 Februari 2014).

UU Keinsinyuran: Beri Perlindungan Profesi Insinyur



Ketua Pansus RUU Keinsinyuran DPR, Rully Chairul Azwar menjadi pembicara dalam Forum Legislasi.

Disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran oleh pemerintah dan DPR bukanlah egoisme dari para insinyur Indonesia, akan tetapi UU itu merupakan salah satu kebutuhan bangsa Indonesia. Pasalnya, sumber daya alam bukan lagi sebagai faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi *knowledge* yang didapat dari sumber daya manusia. Apalagi, insinyur dipandang sebagai profesi yang dapat memberikan nilai tambah dan inovasi terhadap segala jenis industri yang ada.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi tentang RUU Keinsinyuran yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2). Hadir dalam acara forum legislasi tersebut, Ketua Pansus RUU Keinsinyuran DPR, Rully Chairul Azwar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar, dan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Danang Parikesit.

Menurut Rully, ada beberapa alasan penting dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi UU, yaitu banyaknya insinyur Indonesia yang lari ke luar negeri karena kurang mendapatkan apresiasi di Indonesia, banyak insinyur asing yang menguasai level menengah di banyak perusahaan negara dan swasta, dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi inovasi produk dan siap ekspor.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, UU ini merupakan inisiatif DPR, karena sudah diproses selama 15 tahun dan baru sekarang ini bisa disahkan menjadi UU. “Menjadi inisiatif DPR karena peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luas biasa terutama dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Rully.

Selain itu lanjut Rully, perlu meningkatkan tenaga insinyur yang terus menurun, adanya kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan profesi pekerjaan, banyak terjadi malpraktek yang dilakukan insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, dan sedikitnya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompetensi profesi internasional, sehingga daya saing SDM nasional menjadi lemah.

Sementara itu kata Hermanto Dardak, UU Keinsinyuran ini harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungan, dengan konsisten mendukung program pembangunan nasional, yang mempunyai nilai tambah melalui penguasaan teknologi canggih. “Jadi, UU Keinsinyuran ini tak saja mengatur tanggung jawab teknik, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ketua Umum PII, Bobby Gafur Umar menyatakan lahirnya UU tentang Keinsinyuran memberikan tanggung jawab

tersendiri bagi PII. Pasalnya kata Bobby, dengan UU ini, harus dilakukan proses registrasi insinyur dan pengembangan sumber daya manusia keinsinyuran di Indonesia.

Registrasi dan pengembangan sumber daya manusia tersebut menurut Bobby sangat relevan sekali mengingat tahun 2015 merupakan tahun dimulainya ASEAN Economic Community yang harus dipandang sebagai kesempatan emas bagi insinyur Indonesia untuk unjuk prestasi di kawasan ASEAN. "UU ini juga memberikan kesetaraan hak, termasuk upah, bagi insinyur Indonesia terhadap insinyur asing," ujarnya.

Disetujui Paripurna

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Keinsinyuran untuk disahkan menjadi UU dalam acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara

II, Selasa, (25/2).

"RUU Keinsinyuran merupakan perhatian DPR terhadap profesi insinyur," terang Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar dihadapan sidang Paripurna DPR.

Menurutnya, RUU ini sangat penting dan mendesak dalam menunjang dan mendorong *master plan* MP3EI pasalnya, tantangan kedepan semakin nyata karena Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community.

"Karena dengan adanya Asean Economic Community maka banyak tenaga kerja Asing masuk ke Indonesia, kehadiran RUU Keinsinyuran untuk menjawab tantangan besar memberikan jaminan dan rasa aman terhadap profesi insinyur, peluang berkisah dan menjamin kesejahteraan bagi profesi insinyur, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global," terangnya. (sc,nt,si)

Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua

Menyikapi kisruh antara beberapa penghuni dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua, DPR akan tetap berpegang pada undang-undang dan kembali kepada *khittah*. Bahwa ada pelanggaran hukum itu lain persoalan, ada persoalan perjanjian yang tidak dipenuhi itu perdata. Ada tindak pidana umum, itu persoalan lain, tetapi terkait dengan pengurus rumah susun tadi kembali ke *khittah*.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie ketika melakukan mediasi dengan PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua serta dihadiri Wakil dari Pemda DKI, Kemenpera, Ditjen Pajak, PLN dan Bareskrim Mabes Polri, di Gedung DPR, Selasa (25/2). Hadir juga ratusan penghuni rumah susun lain di wilayah Jakarta, serta pakar komunikasi Edfendy Ghazali dan pengacara Palmer Situmorang.

Menurut Marzuki Alie, guna menyelesaikan kasus tersebut, perlu dikumpulkan semua penghuni pemilik, pilih pengurus baru PPRS, akan selesai urusannya. "Itulah yang paling sah. Ini harus diterima karena ini aturan perundangan. Tidak ada seorangpun di republik ini seenaknya dengan kekuatannya menginjak-injak perundang-undangan," tegas dia.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Wakil dari Pemda DKI dalam kesempatan ini menyatakan setuju dengan Ketua DPR bahwa secepatnya dibuat Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) baru yang sesuai dengan undang-undang. "Pemda DKI siap memfasilitasi apabila kedua pihak saling membuka diri untuk melakukan islah kembali ke *khittah*," katanya.

Ditegaskannya, di Pemda DKI ada beberapa ijin yaitu surat ijin penggunaan tanah, ijin bangunan dan ijin penggunaan bangunan atau sekarang disebut sertifikat layak fungsi. Lalu ijin pengelolaan, ini kalau kembali pada satu perijinan namun kalau harta bersama maka tidak boleh diakui oleh pengembang.

Marzuki Alie menegaskan, tidak

setuju kaimat kalau kedua pihak setuju, harus setuju, kita harus tegas. Kalimat-kalimat yang bias harus diluruskan. Pemda DKI harus fasilitasi, Kemenpera di depan, DPR diatas mengawasi bersama polisi. "Ini tidak main-main, *nggak* ada yang tidak bisa dilaksanakan," katanya.

Kabareskrim Komjen Suhardi Alius mengatakan, saat ini Polri menangani 22 laporan dengan rincian satu di Bareskrim, 10 di Polda Metro Jaya, 7 di Jakarta Pusat dan 4 di Jakarta Utara. Satu perkara sudah P21 dan sudah menjadi kewenangan kejaksaan.

Kaitannya dengan dua kubu yang berseteru dan saling lapor, Suhardi berjanji Polri betul-betul netral. Diakui pula bahwa di Polres Jakpus ditahan si pelapor dan lawannya juga ditahan. "Tapi sudah saya perintahkan baru-baru ini, agar kedua-keduanya ditangguk dengan jaminan keluarga masing-masing," ujarnya dengan menambahkan bahwa untuk menangani kasus ini aparatnya ditekannya supaya betul-betul sesuai fakta hukum dan empati kepada semuanya. Bahkan diingatkan kepada penyidik, layanilah masyarakat sebagai keluarga sendiri. "Itu yang paling penting, dan ke depan bisa lebih baik lagi," jela Suhardi Alius. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

Indonesia Harus Mampu Berlakukannya Sistem E-Haji

Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk ikut memberlakukan sistem E-Haji. Bahkan menurut Anggota Komisi VIII, Soemintarsih Muntoro Pemerintah harus mampu mengikuti sistem E-Haji yang ditawarkan Kementerian Haji Pemerintah Arab Saudi.

“Sistem E-Haji yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi merupakan sebuah sistem yang terpadu, dan komprehensif integral, menurut saya sangat baik. Karena penyelenggaraan haji yang melibatkan negara-negara sedunia akan lebih baik jika memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) internasional dengan parameter yang jelas. Misalnya bagaimana SOP pemondokan dan kateringnya,” ungkap Politisi dari Fraksi Hanura ini.

Namun apakah Indonesia mampu menjalankan hal tersebut? Menurut anggota yang akrab disapa Mien ini, Indonesia harus mampu mengikuti sistem tersebut. Apalagi jika hal tersebut menjadi sebuah sistem yang wajib dijalankan oleh sebuah negara penyelenggara haji.

Oleh karena itu ditambahkan Mien, hal yang harus diantisipasi sejak dini adalah mengenal instrumen persiapan. Misalnya bagaimana kualitas pemondokannya, jauh atau tidak dari tempat ibadah, begitupun dengan transportasi dan kateringnya juga harus memiliki SOP yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik gagasan untuk memberlakukan sistem E-Haji oleh pemerintah Arab Saudi. Karena salah satunya akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan efisiensi biaya pemondokan ataupun pelayanan lainnya.

Selain itu, sistem E-Haji akan mendukung transparansi oleh para pemilik pemondokan khususnya. Meski demikian sesuai masukan dari Menteri Agama, Anggito mengatakan jika pemberlakuan sistem E-Haji itu tidak dimulai tahun 2014 ini. Pasalnya dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan dan uji coba hal tersebut terlebih dahulu pada tahun ini.



Anggota Komisi VIII DPR Soemintarsih Muntoro.

“Ada beberapa alasan sehingga Menteri Agama mengusulkan untuk menunda pelaksanaan E-Haji, diantaranya karena belum terlihat adanya kesiapan SDM, serta belum terintegrasinya sistem di masing-masing negara apalagi ada wacana bahwa penyelesaian pelayanan sistem E-Haji ini menjadi persyaratan diberikannya visa haji,” jelas Anggito yang juga pesimis jika ditahun 2014 ini Indonesia mampu melaksanakan sistem E-Haji dengan baik.

Bahkan dikatakan Anggito, akibat belum ada kepastian adanya pemberlakuan sistem E-Haji ini, membuat tim perumahan sempat terlambat mengajukan biaya atau harga sewa pemondokan haji. (Ayu)

Komisi X Audensi dengan Mahasiswa Unpas



Anggota Komisi X Popong Otje Djunjuran.

Sedikitnya 50 mahasiswa Jurusan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, memadati Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara, Selasa

(25/02). Mereka tentu saja bukan untuk berdemo tentang Kurikulum 2013, tapi bertujuan untuk menggali informasi terkini terkait perkembangan pendidikan di Indonesia.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Anggota Komisi X Popong Otje Djunjuran itu, Anggota Komisi X Rohmani menyarankan kepada para mahasiswa untuk membedah buku Kurikulum 2013. Mahasiswa dapat melakukan penelitian buku itu, apakah sesuai dengan tingkatannya.

“Dengan berlakunya Kurikulum 2013 ini, saya berharap mahasiswa dapat membedah buku-buku yang diberlaku-

kan di Kurikulum itu. Dikaji, apakah buku yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tingkatan pendidikannya,” kata Rohmani.

Pada kesempatan yang sama, Sunatra, salah satu dosen pendamping menyatakan tujuan mahasiswa Unpas ke DPR adalah untuk bersilaturahmi dengan Anggota DPR.

“Kami berasal dari FKIP, jadi kami ingin mengetahui sejauh mana kiprah Komisi X dalam memperjuangkan sistem pendidikan nasional kita. Kami menyadari, selama ini praktik pendidikan di Indonesia belum mencapai apa yang diharapkan. Baik dari aspek

rekrutmen, penempatan, pendidikan, hingga sertifikasi guru. Bagi kami, guru memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Tanpa guru, pendidikan di negara ini tidak

akan berjalan,” kata Sunatra.

Sunatra berharap, apa yang disampaikan oleh Anggota Komisi X pada pertemuan ini dapat menjadi bahan

mahasiswa untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia. Pertemuan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Unpas kepada Komisi X dan foto bersama. (sf)

Komisi IV Setuju Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di 4 Provinsi



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo berjabat tangan dengan Menteri Kehutanan.

Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta berdampak strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur.

“Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS terhadap 4 provinsi ini tidak meniadakan sanksi

atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, setelah rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa (25/2), di gedung parlemen, Senayan.

Firman Subagyo mengatakan Komisi IV menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah dan tindak lanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur,” imbuhnya.

Patut diketahui luasan termasuk kategori DPCLS yang disetujui Komisi IV, yaitu Provinsi Jambi seluas 336 ha, Kepulauan Bangka Belitung seluas 4.452 ha, Sulawesi Utara seluas 703 ha, dan Kalimantan Timur seluas 73.731. (As)

Parlemen AS dan DPR Punya Tantangan Sama

Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi topik perbincangan utama pertemuan antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Senin (24/02).

“Ini pertemuan yang bagus. Beliau cukup arif, dan cukup matang sebagai diplomat yang mewakili Amerika Serikat untuk Indonesia. Prinsipnya adalah hubungan yang terjalin selama ini, antara AS dan Indonesia, terjalin hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Banyak hal yang dapat kita pelajari terkait dengan praktek demokrasi di AS,” jelas Marzuki usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Marzuki menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan AS. Ia menilai, kondisi di AS tidak begitu berbeda dengan



Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake.

Indonesia.

“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan AS, termasuk kebebasan media. Mereka (AS) juga terpaksa harus memiliki TV *Cable* untuk mempublikasikan kegiatan DPR kepada masyarakat, termasuk produk-produk yang dihasilkan Parlemen AS (Kongres AS), agar publik tahu apa yang sudah dihasilkan Parlemen,” jelas Politisi Demokrat ini.

Politisi berdarah Sumatera Selatan ini menambahkan, walaupun AS, maupun Indonesia sudah mempublikasikan hasil kerjanya, namun masih ada masyarakat yang belum puas dengan hasilnya. Bahkan, ada yang menilai, Anggota DPR yang dinilai tidak berkompeten, tidak pantas menduduki jabatan tersebut.

“Walaupun sudah ada informasi soal kinerja Parlemen, masyarakatnya masih tetap menilai kinerjanya tidak memuaskan, bahkan juga masyarakatnya menilai Parlemen AS itu memiliki wajah yang buruk juga, hal yang juga terjadi di Indonesia. Apa yang dipandang masyarakat itu, mereka juga menilai Anggota DPR itu tidak pantas untuk menduduki jabatan di Parlemen. Hal ini juga terjadi di Indonesia,” jelas Marzuki.

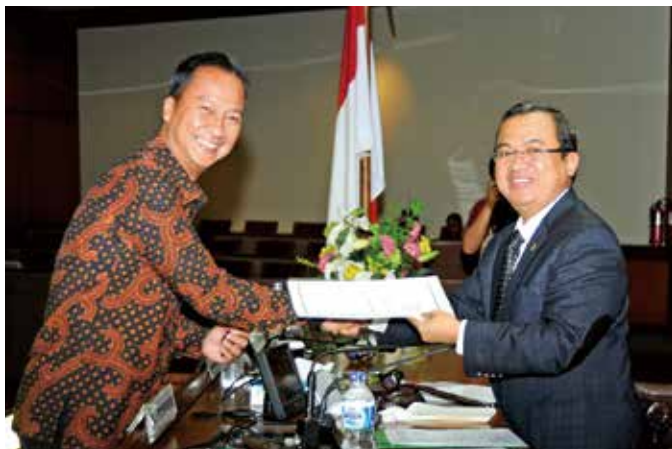
Namun, dibalik persamaan itu, ditemui perbedaan karakteristik antara Parlemen kedua negara. Marzuki menilai, akibat perbedaan ini, membuat pemahaman yang berbeda antar kedua parlemen.

“Ada hal yang agak berbeda antara Kongres AS (Parlemen) dengan Parlemen yang ada di negara lain. Dalam konteks hubungan antar Parlemen, tidak diatur dalam konstitusi AS. Sehingga hubungan antara Parlemen AS dengan negara lain cukup terbatas. Dan AS tidak aktif dalam kegiatan Parlemen Internasional, seolah-olah hubungan Parlemen Indonesia dengan AS itu sedikit sekali komunikasinya, hingga seringkali membuat pemahaman yang berbeda, antara apa yang terjadi di kedua Parlemen,” urai Marzuki.

Sementara itu, Robert mengapresiasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang meliputi bidang keamanan, perdagangan, dan perubahan iklim. Ia berharap, hubungan kedua negara dapat terjalin semakin baik.

Sebagaimana diketahui, Robert menggantikan Scot Marciel untuk jabatan Dubes AS untuk Indonesia. Sehingga, ia bertemu dengan Ketua DPR untuk memperkenalkan dirinya. (sf)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Terorisme Makin Canggih Ikuti Perkembangan Teknologi



Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan Draft RUU kepada Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Tindakan terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena para pelaku mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme mampu menciptakan rasa takut di masyarakat. Salah satu metode yang paling efektif untuk menebar teror dan luka fisik maupun nyawa adalah metode pemboman. Dalam banyak kasus, pemboman memilikidampak yang masif dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam Pembicaraan Tingkat

II/Pengambilan Keputusan terhadapRUU tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) pada rapat Paripurna DPR yang di Pimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa, (25/2) siang.

Agus Gumiwang mengatakan, bahwa metode pemboman lain adalah dilakukan dengan penambahan materia lain atau dapat juga ditambahkan zat radioaktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Kemungkinan aksi terorisme lainnya adalah dengan cara menguasai instalasi nuklir dan melakukan sabotase, atau dengan menyebarkan zat radioaktif, termasuk bahan nuklir ke fasilitas umum dengan tujuan menyebarkan radiasi dan kontaminasi.

Penyalahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku teror akan berakibat sangat fatal. Dalam pengawasannya, tidak mungkin penggunaan nuklir ini hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi lembaga tersebut harus berkoordinasi, dan bekerjasama baik dilingkupan nasional maupun internasional untuk mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak menjadi bahaya bagi kehidupan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan terorisme Nuklir mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir. Dalam Konvensi ini, secara singkat

diatur bahwa seseorang dimasukkkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak suatu fasilitas nuklir, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.

Indonesia tidak memberikan dukungan, dorongan, pembiaran, membenaran, atau legitimasi penggunaan atau

ancaman penggunaan senjata nuklir untuk maksud atau tujuan apapun. Adapun persyaratan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memberikan revisi, yaitu di dalam setiap sengketa yang terkait dengan interpretasi atau penerapan Konvensi ini tidak dapat diajukan kepada Arbitrase atau Mahkamah Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) kecuali dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. (spy)/foto:iwan armanias/parle.

Interpelasi *Outsourcing* BUMN Soroti Penyimpangan Kontrak di BUMN



Anggota Komisi IX DPR Indra.

Anggota Komisi IX DPR Indra dari Fraksi PKS mengatakan, para pengusul Interpelasi *outsourcing* BUMN bertujuan untuk mengetahui berbagai penyimpangan kontrak dan penyalahgunaan kontrak kerja yang kerap terjadi di BUMN.

“Kalau di BUMN saja UU ketenagakerjaan dilecehkan dan dilanggar secara masif bagaimana kita menegakkan UU bagi Karyawan swasta,” ujarnya dihadapan sidang Paripurna, Selasa, (25/2).

Menurutnya, karena itu Komisi IX DPR ingin membenahi entitas negara baru kita bisa membenahi swasta. “Kita telah memanggil berbagai pihak diantaranya Menteri BUMN, dan Direksi BUMN,” katanya.

Sebelumnya, terang Indra, Menteri BUMN sempat menyatakan apapun hasil rekomendasi Panja dirinya akan menjalankannya. “Itu jelas dan lugas tanpa tafsir karena itu kita bekerja meminta data di lapangan kepada semua pihak,” terangnya.

Indra mengatakan, realitasnya sudah tiga bulan ternyata rekomendasi Panja tidak dilaksanakan. “Bahkan kita mendapatkan informasi Direksi BUMN melecehkan rekomendasi Panja tersebut, mereka kalau taat UU tentunya akan mematuhi,” jelasnya.

Dia menilai persoalan interpelasi tidak pas bila dibalikkan kepada Komisi IX DPR. “DPR itu sudah clear, bila tidak dilaksanakan maka kita akan mengajukan hak interpelasi tersebut,” katanya.

(si)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Pimpinan Didesak Kirim Surat ke Presiden Terkait *Outsourcing* BUMN

Anggota DPR totok Daryanto dari Fraksi PAN mendesak Pimpinan DPR untuk segera mengirim surat kepada Presiden agar Menteri BUMN menyelesaikan persoalan *outsourcing* di BUMN.

“Kita harap persoalan *outsourcing* tidak membuat kegaduhan politik karena memang rakyat sudah mulai jengah dengan masalah politik,” ujarnya dihadapan sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa, (25/2).

Totok mengatakan, intinya paripurna telah memberikan mandat pimpinan DPR segera mengirim surat



Anggota DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto.

kepada Presiden. dimana isinya agar Menteri BUMN segera menjalankan hasil mandat Panja *Outsourcing*.

“Cara ini merupakan langkah bijak

dalam menyelesaikan masalah dan sangat ditunggu oleh masyarakat yang melihat Paripurna ini sekarang,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pekerja *outsourcing* BUMN yang telah bekerja puluhan tahun hendaknya memang diangkat menjadi pegawai tetap.

“Persoalan interpelasi ditunda buat ruang baru dialog dengan meminta penjelasan Menteri BUMN dan Menteri Trans,” katanya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi III Mulai Uji Calon Hakim Konstitusi



Suasana Sidang Komisi III DPR.

Komisi III DPR RI memulai proses pengujian calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada tahap pertama 11 kandidat diminta menulis makalah dengan judul yang telah ditetapkan dalam waktu 1 jam. Makalah ini akan didalami lebih jauh pada proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan mulai 3 Maret yang akan datang.

“Makalah ditulis paling banyak 5 halaman dengan lama pembuatan 1 jam. Dalam *fit and proper test* nanti setiap kandidat akan diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan makalah yang ditulisnya hari ini,” kata Wakil

Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/14).

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 1 peserta Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH., M.Si yang berasal dari Balikpapan, Kaltim tidak dapat hadir pada waktunya karena kesulitan mendapatkan tiket pesawat. Ia mengaku baru memperoleh tiket untuk keberangkatan sore hari.

“Surat via pos baru sampai pukul 3 sore dan sudah ditelpon sekretariat

sore hari kemaren disampaikan tidak dapat pesawat pagi ini, baru dapat pesawat untuk sore hari ini. Saya minta pandangan perwakilan fraksi apakah memberi dispensasi untuk mengikuti uji penulisan naskah besok atau ditolak,” tanya Muzammil.

Mayoritas fraksi kemudian menyatakan dapat memaklumi keterlambatan kandidat. “Kami memahami dapat memberikan kesempatan untuk memberi kesempatan mengikuti ujian susulan besok. Proses pengujian masih lama, ada proses yang lebih substansi selanjutnya. Apalagi ini calon dari luar Jawa dan memang tidak mudah bagi kita mencari calon hakim konstitusi,” kata anggota FPAN Taslim saat menyampaikan pandangannya.

Dari 12 calon hakim MK yang mendaftar, 9 di antaranya berasal dari kalangan akademisi, 1 orang notaris, 1 orang mantan pejabat Kemenkumham dan 1 anggota DPR dari FPPP Dimiyati Natakusumah. Anggota dewan lain Benny K. Harman (FPD) yang disebut-sebut akan mencalonkan diri ternyata tidak terbukti. (iky)

Diyat Jangan Dijadikan Alat Pemerasan

Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak kunjung henti. Terakhir, salah satu TKI bernama Satinah terancam akan dieksekusi mati pada 3 April besok, jika Pemerintah Indonesia tidak membayar diyat (denda) sebesar Rp 21 miliar. Beredar kabar, sampai saat ini Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp 12 miliar.

“TKI ini persoalan yang banyak terjadi di kita. TKI terkena kasus-kasus kekejaman di Arab Saudi, dimana juga banyak sekali TKI kita dirugikan. Dengan prinsip ganti rugi diyat yang Arab Saudi terapkan, ini seolah-olah menjadi pemerasan bagi Indonesia. Hasil



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

yang TKI dapatkan relatif tidak banyak secara individu. Tetapi jika terjadi kasus, denda yang dibebankan kepada

TKI itu ribuan kali lipatnya. Ini sangat memprihatinkan kita,” jelas Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/02).

Marzuki menambahkan, sebagai negara sahabat seharusnya Pemerintah Arab Saudi dapat membantu TKI yang terjerat hukum. Ia khawatir, alasan hukum ini menjadi alat pemerasan terhadap Indonesia.

“Kita akan minta peran dari Pemerintah Arab Saudi, untuk memberikan penjelasan, dan juga membantu Warga Negara Indonesia yang terjerat masalah hukum di sana. Supaya tidak

menjadikan ini sebagai pemerasan, ini persepsi kami. Ini akan menyulitkan pemerintah Indonesia, kecuali TKI ini di-cover oleh asuransi, dimana asuransi yang akan memenuhi kewajiban TKI itu, sehingga TKI bisa dibebaskan dan kembali ke Indonesia dengan selamat,” tambah Marzuki.

Politisi Partai Demokrat ini berharap,

ada aturan-aturan yang konkrit antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, terkait dengan perlindungan TKI. Termasuk dengan moratorium antara kedua negara yang dimulai pada 2010 lalu.

“Moratorium sudah dilakukan pada 2010 atas desakan DPR. Kedua negara sudah membuat perjanjian

khusus dalam perlindungan TKI, tetapi memang Arab Saudi ini cukup alot. Kita bersyukur akhirnya mereka mau menerima perjanjian itu. Sebagai negara yang berdaulat dan bersahabat, Hak Asasi Manusia ini harus benar-benar ditegakkan di negara sahabat. Indonesia harus bersikap tegas, agar kedepannya tidak terjadi lagi,” harap Marzuki. (sf)

Belanda Harus Akui Kemerdekaan Indonesia

Sampai saat ini, Pemerintah Belanda masih bersikeras mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1949. Padahal, negara lain di seluruh dunia mengakui bahwa Kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945.

Hal itu menjadi topik pembicaraan utama antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan perwakilan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). KUKB sendiri diketuai oleh Batara Hutagalung. Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Senin (24/02).

“Ini aspirasi dari sebagian masyarakat, bagaimana Belanda harusnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bukan pada tahun 1949. Apa yang dilakukan KUKB ini sangat bagus. Sebagai Pimpinan DPR, tentu ini akan kita tindaklanjuti, akan kita bawa ke rapat pimpinan, dan akan kita teruskan ke Komisi terkait, karena ini menyangkut hubungan antara kedua negara,” kata Marzuki usai pertemuan.

Namun, walaupun ini langkah baik, Marzuki tetap mempertimbangkan upaya ini. Jangan sampai, permintaan pengakuan ini malah merugikan kedua negara.

“Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, jangan sampai justru langkah yang dilakukan ini merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Langkah ini jangan mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Tentunya, hal ini diharapkan untuk memperbaiki



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Delegasi KUKB.

hubungan, jangan sampai ada ganjalan untuk membangun hubungan ke depannya,” jelas Marzuki.

Politisi Demokrat ini menambahkan, Pemerintah Belanda harus berbesar hati dalam hal ini. Pasalnya, ini menyangkut martabat Indonesia di mata Belanda. Pengakuan ini penting untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Belanda ke depannya.

“Martabat negeri ini harus betul-betul diakui dan dihargai, secara *de jure* Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tentunya kita berharap agar ada kelegowoan dari Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semua negara mengakui itu, hanya Belanda yang tidak. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat aneh,” heran Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Batara menyambut baik pertemuan ini. Ia menyatakan bahwa pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda merupakan harga mati.

“Kami mengapresiasi Ketua DPR mendukung perjuangan kami. Menurut kami, pengakuan *de jure* dari Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu menyangkut dua hal, kedaulatan dan martabat bangsa. Untuk kami, ini harga mati, tidak bisa ditawar lagi,” jelas Batara.

Ia menambahkan, jika memang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, efeknya secara tidak langsung Belanda mengakui agresi militer terhadap negara yang merdeka. Konsekuensinya, Belanda harus membayar pampasan perang.

“Kami mengetahui kesulitan Belanda. Kalau pemerintah Belanda mengakui *de jure* kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945, berarti mereka terpaksa mengakui yang mereka namakan aksi polisional itu adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekuensi logisnya mereka harus membayar pampasan perang dan yang paling parah, tentara Belanda akan menjadi penjahat perang, ini yang paling mereka takuti,” tambah Batara.

Untuk itu, tambah Batara, upaya pengakuan dari Belanda diharapkan dapat memuaskan kedua negara, dan tercipta

rasa saling menghargai dan menghormati.

“Kami usulkan, mari kita duduk bersama, dan mencari *win-win solution*. Dengan artian, upaya ini memuaskan kedua belah pihak. Martabat Indonesia tetap kami pertahankan. Di lain pihak, Tentara Belanda tidak dicap sebagai penjahat perang. Kegiatan kami bukan untuk membalas dendam, yang kami tawarkan adalah suatu rekonsiliasi yang bermartabat, artinya antara kedua negara yang setara dan sederajat, dan tercipta saling menghargai dan menghormati,” tutup pria berkacamata ini. (sf) Foto:odjie/parle/hr.

DPR Tunda Usul Interpelasi Outsourcing BUMN

Rapat Paripurna DPR RI menunda usul penggunaan hak interpelasi terkait kasus ketenagakerjaan *outsourcing* di perusahaan BUMN. Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna Selasa (25/2) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Hak interpelasi belum perlu digunakan. DPR akan meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memberikan penjelasan di tingkat komisi,” kata Priyo.

Dijelaskan Priyo, jika nanti anggota DPR tidak puas dengan penjelasan Menteri BUMN, maka interpelasi tetap berjalan.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Fraksi yang menyetujui penundaan hak interpelasi antara lain Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB. Sementara Fraksi Partai Golkar, PKS, PDIP dan

Gerindra tidak setuju permasalahan ini dikembalikan ke tingkat komisi.

Fraksi-fraksi yang menyetujui penundaan beralasan bahwa interpelasi bukanlah langkah yang efisien untuk mencari solusi. Pasalnya, hanya akan menggiring masalah ke ranah politik. Apalagi, Menteri BUMN sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah *outsourcing*.

Sementara fraksi-fraksi yang menolak penundaan hak interpelasi, menilai pihak BUMN tidak menginginkan rekomendasi dari Panja *Outsourcing*. Karenanya, perlu adanya pertanggungjawaban dari presiden langsung. (sc)

RUU PPHMHA Sangat Aspiratif Bagi Masyarakat Adat

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) yang sedang dibahas oleh Pansus DPR RI sangat aspiratif terhadap masyarakat adat. Semua kepentingan masyarakat adat dilindungi dan diapresiasi. Inilah salah satu RUU yang cukup monumental yang dihasilkan DPR.

Ketua tim kunjungan kerja Pansus RUU PPHMHA, Herman Kadir (F-PAN) kepada pers dan masyarakat adat di Jambi, meyakinkan bahwa RUU ini sangat aspiratif terhadap masyarakat



Ketua tim kunjungan kerja Pansus RUU PPHMHA, Herman Kadir saat memimpin pertemuan dengan para Tokoh Adat Jambi.

adat yang ada di Jambi, juga masyarakat adat di seluruh Tanah Air. “Hari ini kami sudah terima masukan yang bagus dari para tokoh masyarakat adat Jambi. RUU ini sangat melindungi masyarakat adat,” jelas Herman di Jambi, Senin (24/2).

Selama ini, kata Herman, banyak tanah adat yang dirampas perusahaan-perusahaan daerah. Di sinilah pentingnya BPN daerah memetakan kembali tanah milik masyarakat adat. Bila sudah dipetakan, sebaiknya segera tanah-tanah tersebut dikembalikan

kepada masyarakat adat. Di Jambi, tanah masyarakat adat banyak dirampas untuk HPH, kebun kelapa sawit, dan lain-lain. Sementara masyarakat adat sendiri tak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas riwayat tanahnya.

Konflik kerap terjadi, dan tanah-tanah yang memang riwayatnya sudah turun temurun diwarisi masyarakat adat tak bisa diselesaikan dengan hukum positif. Tanah tersebut dikembalikan ke masyarakat adat dengan menggunakan hukum adat setempat. Bila Pemda ingin memanfaatkan lahan

milik adat, sebaiknya dibuat pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

“Tanah adat harus disertifikasi dan tidak bisa diperjualbelikan,” papar Herman. Bila melihat penerapan hukum adat di luar negeri, mereka malah diberi tambahan tanah oleh pemerintah. Di Indonesia malah banyak yang dirampas. Seperti diketahui, masyarakat adat justru sumber penghidupannya dari tanah yang mereka miliki itu. (mh) foto: hr/parle/m.husen*

Komisi V DPR Akan Perjuangkan Anggaran Infrastruktur Malut

Komisi V DPR berjanji akan memperjuangkan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya infrastruktur di Provinsi yang dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 ini masih dijumpai beberapa kekurangan baik di beberapa kota kabupaten maupun di Ibukota Provinsi Sofifi.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunker Spesifik Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena melakukan kunjungan ke Provinsi Malut Rabu pekan lalu. Tim DPR begitu tiba di Ternate langsung menggelar pertemuan dengan Pemda Malut diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi & Kesra Abuhari Hamzah dan jajarannya serta didampingi Kepala Bandara Babullah Taslim Badaruddin.

Menurut Michael, kunker spesifik dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan terutama terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015.

Kepada Tim Komisi V, Abuhari menyatakan, sejak dimekarkan Provinsi Malut masih kekurangan infrastruktur. “Kami belum puas jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi kepulauan lainnya. Kekurangan infrastuktur tidak hanya di kabupaten/kota, tetapi juga ibukota Provinsi Malut Sofifi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Malut adalah Provinsi kepulauan, tentunya sangat membutuhkan pelabuhan penyeberangan, meski saat ini telah memiliki beberapa pelabuhan. Selain itu untuk pembangunan jalan masih memerlukan bantuan dana dari pusat melalui APBN.

Michael usai pertemuan mengatakan Bandara Babullah Ternate dibangun sejak tahun 1971 dan saat ini telah berhasil didarati pesawat berbadan lebar. Untuk menunjang aktifitas yang kian meningkat, maka lebar landasan yang selama ini hanya 30 meter akan diperluas menjadi 45 meter yang dibiayai APBN. “Proses pelebaran ini sedang dalam tahap



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat diwawancarai wartawan.

pekerjaan, Komisi V akan memperjuangkan dan diakomodir dalam APBN,” katanya.

Seusai pertemuan Tim DPR selanjutnya mengunjungi Sofifi- yang disiapkan sebagai Ibukota Malut menggantikan kota Ternate sekaligus memantau kondisi jalan serta meninjau pelabuhan Fery Guraping serta meninjau Bendungan Kali Oba yang menyediakan air bersih yang didistribusikan penduduk di kota Tidore.

Dalam pantauan langsung jalan darat dari Sofifi ke Dodinga, Tim DPR sangat mengapresiasi kondisi jalan yang cukup baik. “Kami apresiasi kepada Bina Marga Balai 9 Wilayah Malut, hampir sepanjang 1.000 km jalan nasional dan jalan strategis digabung, jalan yang kami lewati luar biasa,” tandas Wattimena memuji kondisi jalan yang mulus beraspal. (mp), foto : hr/parle/mastur*

Komisi VIII Soroti Rendahnya Penyerapan BSM



Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah saat memimpin rapat.

Tim Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah (F-PKB) menyoroti masalah program BSM yang tidak mulus pelaksanaannya. Peralnya, kata Fauziyah, program ini tidak semulus perencanaannya karena sampai bulan Agustus 2013 yang lalu daya serap terhadap BSM ini baru 12-13 persen.

“Ini sungguh menjadi perhatian yang serius bagi Panja BSM Komisi VIII, karena ternyata penyerapannya sangat rendah,” tegas Fauziyah saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, di Gedung Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, ada anak didik yang seharusnya mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan, dan juga anak didik yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif karena persyaratan untuk mendapatkan BSM tidak sederhana. Sedangkan realisasinya tidak tepat waktu, dan beberapa minggu ini saja masih banyak yang belum mendapatkan BSM. “Padahal ini sudah bulan Februari 2014,” katanya.

Menurutnya, program BSM merupakan program nasional yang bertujuan mulia dan menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Disamping itu, mencegah angka putus sekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembelajaran serta mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, dan tentu saja menyambut program pendidikan menengah universal.

“Komisi VIII ingin mendapatkan peta permasalahan terkait dengan penyelenggaraan implementasi program BSM Kemenag serta berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang terkait dengan penyaluran BSM tersebut,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Mahfud Sudar menjelaskan masalah BSM tahun 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dari berbagai sumber yaitu dari APBN, APBD dan sebagian dari jalur aspirasi.

“Untuk BSM yang bersumber dari APBD dan APBD melalui aturan yang ada,” kata Mahfud.

Dari APBD ini untuk sekolah negeri berjumlah 63.925 siswa, untuk sekolah swasta berjumlah 359.618 siswa, jadi jumlah seluruhnya negeri dan swasta 429.543 siswa dari sumber APBD. Dari APBD untuk negeri maupun swasta berjumlah 739.401 siswa. Kuota yang ada 1.162.943 siswa dari jumlah APBD maupun APBD. Sedangkan dari jalur aspirasi, mendapatkan 9.469 siswa.

“Dengan terlalu banyaknya siswa yang hampir 1,2 juta, Provinsi Jawa Timur tidak mampu untuk menyalurkan di tingkat provinsi. Akhirnya, pada akhir tahun tepatnya bulan November kami sebar ke kabupaten/kota se-Jawa Timur, dengan kuota masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur,” jelasnya.

Dia menambahkan, karena tidak ada satu pun yang namanya Bank atau Kantor Pos mampu untuk membuka rekening siswa yang jumlahnya hampir 1,2 juta, akhirnya dibagi di masing-masing kabupaten/kota. “Jadi bukan berarti kami lepas tanggungjawab, tapi supaya segera bisa tersalurkan,” ujarnya.

Terkait dengan realisasi program BSM tahun 2013 yang bersumber dari APBD, Mahfud menjelaskan untuk sekolah negeri maupun swasta yang berjumlah 429.543 siswa sudah terealisasi 88,5 persen. Peralnya, dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 itu bisa diterima di SMP, jadi tidak otomatis berada di Tsanawiyah. Yang tidak di Tsanawiyah itu tidak otomatis masuk di Aliyah bisa juga diterima di SMA. “Akhirnya dari sekian ini ternyata memang tidak bisa 100 persen terserap, itu penyebabnya,” jelasnya.

Mahfud mengakui, sampai sekarang itu masih ada siswa yang belum mendapatkan BSM. Permasalahannya bukan berarti tidak sampai, tapi terkendala di bank dalam pengambilan uangnya. Dia memberi contoh, siswa yang mendapatkan BSM ini melibatkan orangtua dalam rekening banknya tetapi saat mengambil uangnya tidak membawa KTP.

la berharap agar penerimaan BSM ini bisa dilewatkan ke lembaga masing-masing seperti BOS itu, “Insya Allah” lebih cepat dan tidak sampai ada kendala yang berarti. (iw)/
foto: iwan armanias/parle.

Wakil Bicara



Anggota Komisi VIII Ahmad Rifai Suftyadi

“Sesuai persyaratan yang kita setuju, kita tidak mau ada catering atau Pemandokan yang sudah di *black list* masuk lagi. Begitupun dengan maskapai haji, jangan hanya tergantung dengan dua *airlines*. DPR ingin transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji.”

“Sikap kenegarawanan mesti kita dahulukan dan lepaskan semua kepentingan. Apapun hasil Pemilu nanti, DPR periode sekarang ini hendaknya bisa menyelesaikan pembahasan RUU MD3. Kita harus tetap menyelesaikan, biar ini jadi dedikasi terakhir, walaupun tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR.”



Anggota Pansus RUU MD3 TB. Soenmandjaja

“Saya pribadi tidak puas dengan kinerja anggota DPR yang ada. Ini adalah DPR pertama dengan sistem suara terbanyak. Ini bisa dikatakan eksperimen. Sebelumnya nomer urut sehingga partai bisa mengatur... Rakyat harus bisa memilih yang terbaik. Kita juga tahu rakyat ada juga yang transaksional, memilih yang bayar, makanya hasilnya jadi demikian.”



Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudo Husodo

Komisi V Dukung Percepatan Pengoperasian Pelabuhan *Cruise* Tanah Ampo

Komisi V DPR RI mendukung percepatan proses pengoperasian Pelabuhan *Cruise* Tanah Ampo, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karangasem, Bali.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said mengatakan program pembangunan Pelabuhan *Cruise* Tanah Ampo harus dilaksanakan dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan menghindari tumpang tindih program untuk memperluas cakupan program.

“Kita semua menyadari, beban dan tanggung jawab membangun Kabupaten Karangasem bukan hanya dipundak Pemerintah Daerah, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya, saat memimpin Kunjungan Spesifik di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Rabu pekan lalu.

Kunjungan Kerja Spesifik ini dimaksudkan untuk meninjau *existing* dan lokasi rencana pembangunan Jetty dengan sistem *rampdoor* di Pelabuhan *Cruise* Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, sekaligus sebagai pelaksanaan tugas Komisi V memantu pembangunan di bidang infrastruktur serta evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2014,

Menurut Muhidin, kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memposisikan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting di samping migas. Diantara daerah wisata yang ada di Indonesia, Bali merupakan tujuan wisata favorit. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali konsisten menempatkan sektor andalan. Pengembangan industri pariwisata di Bali secara umum menerapkan konsep *implicit* memasuki misi menumbuh suburkan kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya.

Di lain pihak, kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang mem-



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau Pelabuhan *Cruise* Tanah Ampo.

berikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali, seperti tercermin dalam komposisi penyumbang pertumbuhan perekonomian Bali sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu menjadi sektor andalan Provinsi Bali.

Dikatakan Muhidin, tidak salah untuk dikatakan bahwa tingkat perekonomian Bali sangat bergantung pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, untuk menunjang sektor andalan tersebut perlu didukung infrastruktur penunjang yang baik.

“Ketersediaan pelabuhan untuk pelayanan kapal *cruise* dan *yacht* merupakan salah satu daya dukung dan daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang menggunakan kapal laut bersandar di Pulau Dewata ini,” tegas Muhidin M. Said.

Bupati Karangasem I Wayan Gerede menyatakan bahwa satu-satunya fasilitas infrastruktur pelabuhan Kapal pesiar di Indonesia dan di Bali hanya di lokasi Tanah Ampo Manggis Karangasem.

I Wayan Gerede mengharapkan Pemerintah pusat dan DPR RI hendaknya fokus pada komitmen untuk penyelesaian pembangunan pariwisata Tanah Ampo dan menjadikannya prioritas untuk diselesaikan.

“Strategi pembangunan infrastruk-

tur pelabuhan *cruise* merupakan upaya untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan, sekaligus mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Timur, mengingat Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata,” katanya.

Menurut I Wayan Gerede, Pelabuhan Pariwisata *Cruise* Tanah Ampo yang menjadi prioritas pembangunan sudah berdasarkan kajian teknis lengkap baik FS, DED, Amdal maupun kelayakan lainnya dengan panjang dermaga 154 meter, dibangun sejak tahun 2007 menyerap dana APBN sampai tahun 2010 antara lain dalam bentuk pembangunan pematangan lahan, pembangunan *causeway*, *trestle* dan dermaga, verlay jalan masuk dan badan jalan dan perkerasan akses keluar areal.

Pemkab Karangasem sejak 2006 sampai 2008 membiayai berupa studi kelayakan, DED sisi darat, *master plan*, pengadaan tanah zona inti dan peningkatan jalan akses (pengaspalan) dan pembebasan lahan jalan masuk ke pelabuhan.

Selain itu, Pemprop Bali telah mendukung untuk pembangunan gedung penumpang, gedung terminal, pengawas gedung terminal, gedung kantor Adpel dan CIQ, Konsultan pelaksanaan *landscape* dan konsultan pengawas *landscape*. (as)

Program BSM di Gorontalo Dilaksanakan dengan Baik

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kementerian Agama RI khususnya di Provinsi Gorontalo sangat memuaskan dan 100 % telah melaksanakan dengan baik, tegas Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily saat menggelar pertemuan dengan Kakanwil Kemenag, Kepala Kemenag Kab/Kota, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pimpinan/Kepala Sekolah/Pengelola MI, MTS, MA se-Provinsi Gorontalo Kamis pekan lalu.

Lebih lanjut Ace menjelaskan bahwa, program bantuan dari Pemerintah ini dilaksanakan melalui anggaran Kemenag RI berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah serta Madrasah Aliyah yang orang tuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Program BSM ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak.

Disamping itu, Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa. Sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Sasaran program BSM adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, kepada setiap siswa yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu BSM.

Kepala kantor Wilayah Kemenag Prov. Gorontalo, Muhajirin Yanis menyatakan untuk tahun anggaran 2013/2014, Kementerian Agama RI menerapkan persyaratan/kriteria siswa yang berhak menerima manfaat dana BSM dengan mekanisme yang ada.

Yakni, siswa yang berasal dari Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan/menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), khusus untuk siswa baru kelas 1 MI dan kelas 7 MTs tahun pelajaran 2013-2014 yang mendapatkan kartu calon



Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR TB. Ace Hasan Syadzily saat pertemuan dengan jajaran Kemenag.

Penerima BSM (Kartu BSM).

Selain kriteria di atas, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria orang tua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial.

“Pencairan dana Program BSM dilakukan di Kanwil Kemenag Prov untuk siswa Madrasah Negeri maupun swasta, sedangkan bagi Madrasah Negeri yang memiliki DIPA yang telah mengalokasikan dana program BSM dapat melakukan pencairan secara mandiri sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Adapun mekanisme penyaluran dana program BSM melalui pembayaran langsung dapat melalui rekening kas umum Negara ke rekening penerima dana program BSM pada bank/pos atau dari rekening kas umum Negara ke rekening bank/pos penyalur. “kata Muhajirin. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Saham Perusahaan Telekomunikasi Harus Dinasionalisasi

Menyusul banyak penyadapan yang dilakukan intelijen asing lewat perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tanah Air, sudah saatnya perusahaan tersebut dinasionalisasi kembali. Bahaya penyadapan sudah sangat mengganggu stabilitas negara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di ruang kerjanya, Jumat (21/2). Seperti diketahui Pemerintah Australia gencar menyadap para pejabat Indonesia. Bahkan, perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang sahamnya dikuasai asing diduga menyadap para pengguna pon-

sel operator tersebut.

“Ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan karena seolah-olah segala tingkah dan semua keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh negara, ekonomi maupun politik, termonitor oleh negara-negara asing. Ini semua tentu mengecewakan kita bersama,” sesal Priyo.

Pihaknya menghimbau otoritas

intelijen dan kementerian yang berwenang untuk mengamankan negara dari bahaya penyadapan pihak asing. APBN telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Kemenkominfo dan intelijen untuk menghalau penyadapan. Teknologi telekomunikasi Indonesia sudah cukup memadai untuk menghindari aksi sadap tersebut.

Martabat dan harga diri bangsa terlecehkan lewat aksi sadap yang be-

gitu bebas dilakukan asing. “Saya rasa perlu langkah-langkah yang heroik-nasionalis dari para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang nasionalisasi alat-alat telekomunikasi. Saham-saham Telkom, saham-saham Indosat, saham-saham apapun yang berkaitan dengan alat telekomunikasi saatnya dinasionalisasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Priyo. (mh)/
foto:iwan armanias/parle/andri*

BAKN Minta Garuda Perbaiki SPI



Pertemuan BAKN dengan Direksi PT Garuda Indonesia.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta PT Garuda Indonesia meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Intern (SPI) agar akuntabilitas di perusahaan BUMN ini lebih optimal. Hal ini mengemuka pada Kunjungan Kerja BAKN mendalami Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Garuda Indonesia dan Anak Perusahaan di Jakarta, Cengkareng dan Denpasar.

“Setelah mendapat penjelasan dari jajaran direksi PT Garuda Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan BPK, kami mendorong Garuda untuk meningkatkan pelaksanaan SPI. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pada akhirnya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi temuan BPK,” kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso di Denpasar, Bali, Rabu (19/2).

Dalam pertemuan yang dihadiri Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dan

auditor Badan Pemeriksa Keuangan - BPK RI ini sejumlah temuan mendapat perhatian BAKN diantaranya kelebihan pembayaran tarif konsesi jasa *ground handling* PT Garuda Indonesia kepada PT Garuda Angkasa minimal selama tahun 2008-2012 dan pengelolaan suku cadang milik PT Garuda oleh PT. GM-FAA tidak diserahkan dengan baik mengakibatkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan.

Sumarjati menekankan BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, berfungsi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka pengawasan penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BAKN dapat meminta penjelasan diantaranya kepada Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, BUMN, BUMD dan badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi Partai Golkar, Kamaruddin Sjam mengingatkan SPI sangat penting dalam pelaksanaan teknis operasional. Ia juga meminta pengendalian dan

pengawasan pada semua pembiayaan yang terkait dengan kontrak juga harus lebih ditingkatkan.

“Jadi kalau hanya mengatakan kami sudah melakukan penagihan, sudah melakukan penjadwalan kembali, itu tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Sistem pengendalian-lah yang harus diubah. Ini terkait pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau kelemahan sumber daya manusia yang ada pada PT Garuda Indonesia sendiri,” tegasnya.

Selain itu Sjam meminta dalam membuat klausul kontrak dengan pihak ketiga, PT Garuda Indonesia harus lebih cermat. Hal ini agar tidak menimbulkan celah kelemahan yang mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Mantan auditor BPKP ini menyebutkan temuan BPK, terdapat kelemahan beberapa kontrak misalnya tentang ketentuan dan perubahan lebih lanjut akan diamandemen.

Temuan BPK lain terkait klausul pengaturan denda keterlambatan dalam pembiayaan perawatan pesawat. PT Garuda mendapat denda keterlambatan sebesar 1,2 juta dollar dari pihak ketiga, tetapi efek dari keterlambatan ini Garuda harus memperpanjang sewa pesawat yang akhirnya berdampak pada kerugian sebesar 4,5 juta dollar. Bagi Sjam ini sangat merugikan PT Garuda. “Hal-hal seperti inilah yang dapat membuka peluang untuk terjadinya kesalahan dan kerugian pada perusahaan,” pungkas dia. (ray) foto:ry/parle

Komisi IX DPR Pantau Program JKN ke Kalsel

Di tengah maraknya keluhan dari masyarakat, organisasi profesi maupun organisasi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Soepriyatno melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka melakukan fungsi pengawasan ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (26/2).

Pada pertemuan tersebut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Achmad Rudiansjah, para Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala Kanwil BPJS Kalsel dan instansi terkait lainnya, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Banjarmasin.

Menurut Soepriyatno, kunker spesifik ini dilakukan untuk melihat secara langsung kinerja BPJS Kesehatan Provinsi Kalsel yang dulunya adalah PT. Askes dalam melaksanakan program JKN. Ia juga menengarai, program JKN yang belum genap dua bulan berjalan tentunya pasti ada kekurangan dan keluhan dari berbagai pihak yang terlibat.

“Kami ingin mendengar secara langsung dari para pemangku kepentingan terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program JKN. Seperti belum



Tim kunjungan spesifik Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Soepriyatno saat pertemuan dengan jajaran Pemda Kalsel.

maksimalnya sistem rujukan, perbedaan obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui daftar Formularium Nasional (FORNAS) dengan obat-obatan yang ditanggung sebelumnya oleh program JAMKESMAS melalui Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO). Selain itu, rumah sakit daerah juga menghadapi masalah tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013 yang menyebabkan kesulitan beroperasi,” jelasnya.

Di lain pihak, Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mendukung dan telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan program JKN dengan sosialisasi BPJS Kesehatan ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Selain itu, dipersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan

rujukan tingkat lanjutan, termasuk *mapping* (pemetaan) kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menanggapi tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo yang hadir mendampingi Anggota Komisi IX DPR RI, menjelaskan, berdasarkan data terkini jumlah dana yang belum dibayarkan sebesar Rp 2,9 Trilyun dan pada bulan Maret tahun ini akan dibayarkan Rp 1,3 Trilyun untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Tim Kunker Spesifik Anggota Komisi IX. DPR RI berjumlah 9 orang yaitu Soepriyatno, Nova Riyanti Yusuf, Didik Salmijardi, Anita Yacoba Gah, Gede Pasek Suardika, Verna Gladies Merry Inkiriwang, Aditya Anugrah Moha, Sri Rahayu, Abidin Fikri, dan Zuber Sa-fawi. (Naefuroji)

RUU MD3 Perkuat Sistem Presidensial dan Parlemen yang Akuntabel

Kalangan DPR mengapresiasi penyempurnaan rencana kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) (RUU MD3). Salah satu rencana kerja Pansus RUU MD3 adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan membangun birokrasi parlemen yang kedap korupsi.

“Jadwal (rencana kerja Pansus MD3-red) sangat memuaskan



Anggota Pansus RUU MD3 Soemmandjaja, Harry Wicaksono dan Ahmad Yani.

kan untuk kita kawal bersama karena kita akan menyiapkan pengaturan untuk yang akan datang, maka sikap negarawan kita mesti kita dahulukan kita lepaskan semua kepentingan,” kata anggota Pansus RUU MD3 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Soemmandjaja, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (27/2), dalam rapat penyempurnaan rencana kerja Pansus dan penyampaian paparan tim teknis Pansus RUU MD3.

Soemmandjaja mengatakan apapun hasil Pemilu nantinya, pihaknya ber-

harap DPR periode saat ini tetap menyelesaikan pembahasan RUU MD3. “Kita harus tetap menyelesaikan, biar ini jadi dedikasi terakhir walaupun tidak kembali lagi (terpilih kembali menjadi anggota DPR-red),” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pansus RUU MD3, Benny K Harman, mengatakan Pansus RUU MD3 bakal segera mengundang berbagai pihak dalam pembahasan RUU MD3. “Kami akan undang para tokoh masyarakat, LSM, KPK, BPK, asosiasi-asosiasi DPRD. Semua itu untuk beri masukan ke-

pada Pansus,” katanya.

Politisi dari Partai Demokrat itu menambahkan, Pansus juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam setiap pembahasan. “Dengan RUU MD3 yang nantinya disahkan menjadi UU, kita akan membangun parlemen yang kredibel, akuntabel, dan transparan,” kata Benny.

Ia juga mengusulkan agar setiap fraksi mengutuskan anggota permanen untuk terlibat dalam pembahasan RUU ini. “Maksudnya anggota permanen di sini yang selalu mengikuti dari awal sampai selesai, poinnya ada anggota tetap disetiap fraksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Ahmad Yani mengatakan pihaknya menginginkan adanya penguatan terhadap lembaga perwakilan termasuk DPD. “Peranan DPD dalam fungsi legislatif juga akan didiskusikan untuk dioptimalkan,” kata Yani.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap ke depan DPD dapat lebih bertanggung jawab. Sebab selama ini keberadaan DPD dinilai tidak jelas. “Penguatan DPD itu penting supaya bisa lebih bertanggung jawab. Sekarang ini DPD punya hak sama tapi tugas dan kewajibannya berbeda,” ujarnya. (nt)



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf mengatakan, DPR bisa menolak semua calon hakim konstitusi apabila semua calon tidak sesuai keinginan.

DPR Bisa Tolak Calon Hakim MK Jika Tidak Layak

“Kalau tidak mumpuni ya bisa pilih satu atau tidak ada sama sekali,” kata Al Muzammil dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2) tentang “Siapa pantas menjadi hakim konstitusi? Dalam diskusi itu, hadir pula anggota Komisi II DPR, Dimiyati Natakusumah dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Seperti diketahui, para calon hakim konstitusi akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada 3 hingga 5 Maret 2014, setelah

sebelumnya 12 calon hakim konstitusi membuat makalah terlebih dahulu.

Al Muzammil mengatakan, Komisi III bersama tim pakar akan melihat kemampuan dari 12 nama calon itu, mulai dari pembuatan makalah hingga *fit and proper test*. Mereka pun telah menyiapkan tiga aspek penilaian yang menjadi perhatian komisi yang membedakan masalah hukum, keamanan dan perundang-undangan itu. “Keilmuan mereka terhadap konstitusi, MK, *track record*. Di luar kemampuan mereka dan visi misi. Itu tiga aspek yang akan

dinilai,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan penilaian itu akan dibawa dalam forum antara Komisi III dengan tim pakar untuk mencari mereka yang layak menduduki kursi sebagai hakim konstitusi. “Tim pakar konsolidasi, maka fraksi mempertimbangkan apa yg disampaikan pakar itu. Hak pilihnya tetap ada di DPR,” ujarnya.

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin berharap DPR percaya diri dalam memproses rekrutmen calon hakim konstitusi. Sebab, kalau tidak percaya

diri, rakyat juga akan sulit percaya. Bahkan, kata Irman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus percaya diri untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada lembaga peradilan konstitusi tertinggi tersebut dengan putusan-putusan yang konstitusional.

“MK itu merupakan kristalisasi dari ketiga kekuasaan, yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA), sehingga MK itu memegang tiga kekuasaan, yang mempunyai kepentingan konstitusionalnya sendiri-sendiri. Karena itu, sembilan anggota hakim MK itu diajukan oleh ketiga lembaga tinggi negara tersebut, masing-masing tiga orang,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Irman, masing-masing pembawa kepentingan konstitusional tersebut menurut Irman, belum tentu bisa meyakinkan yang lain. Misalnya ketiga utusan DPR itu belum tentu bisa meyakinkan 6 hakim dari Presiden RI dan MA RI. Sebab, masing-masing hakim MK tersebut ingin mewakili kepentingan lembaga yang tersebut.

Yang terpenting kata Irman, hakim MK itu menguasai konstitusi dan ketanegaraan atau semacam negarawan, yang tidak lagi berkepentingan dengan popularitas dan elektabilitas, karena mereka sudah selesai dengan berbagai kepentingan politiknya.(nt)

Incar Sekjen IPU, Italia Minta Dukungan DPR

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Italia untuk Indonesia, Federico Failla. Kedatangannya dalam rangka menyampaikan keinginan negara itu untuk menduduki kursi Sekjen IPU (*Inter Parliamentary Union*).

“Kita menyambut baik apabila Senator Barbara dicalonkan Italia, kita akan mempelajari. Keunggulannya tentu akan jadi pertimbangan kami,” kata Surahman dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/13).

Ia menambahkan hubungan baik kedua negara sudah berlangsung sejak lama, tahun 1949. DPR secara khusus sudah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral - GKSBI Indonesia Italia dan mengirim delegasi untuk kunjungan persahabatan ke negara yang terkenal dengan Menara Pisa ini.

Politisi FPKS ini menyebut disamping Italia, 4 negara lain secara resmi sudah menyatakan minat untuk posisi Sekjen Organisasi Parlemen Dunia ini. “Kamerun, Pakistan, Finlandia dan Belgia juga sudah menyebut nama kandidat. Semua juga sudah melobi DPR, jadi nanti kita pelajari dan dibicarakan



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menerima kunjungan kehormatan Dubes Italia.

dalam rapat BKSAP siapa yang patut kita dukung,” ungkapnya usai rapat.

Sebelumnya Dubes Italia menjelaskan Senator Barbara Debra adalah anggota parlemen yang aktif berkecimpung di IPU dan sejumlah organisasi internasional lainnya. “Pengalaman dan kepemimpinannya di IPU, LSM dan organisasi internasional di sejumlah negara sudah teruji,” paparnya.

Tingkatkan Investasi

Dalam pertemuan tersebut Federico memberikan apresiasi karena seorang pengusaha Indonesia sudah berhasil melakukan investasi cukup besar di Italia. “Pertumbuhan Indonesia sangat menarik perhatian bangsa Italia, apalagi sejak pengusaha Erick Tohir berinvestasi cukup besar di Klub Sepak Bola Inter Milan,” ujarnya.

Sejauh ini menurutnya minat pengusaha Italia untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga cukup baik. Perusahaan minyak dan gas bumi dari negaranya tercatat telah menanam investasi senilai 500 juta Euro di Pulau

Karimun kemudian kerja sama Pirelli dengan PT. Astra senilai 100 juta Euro.

Ketua BKSAP juga mempromosikan sejumlah peluang investasi di Indonesia yang terbuka lebar bagi pengusaha

Italia. “Pengusaha Erick Tohir juga wakil rakyat Indonesia yang sebagian besar mencintai bola. Kita harap investasi pengusaha Italia di Indonesia bisa ditingkatkan,” demikian Surahman. (iky)

DPR Targetkan RUU Pertanahan Rampung Periode Ini



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dan Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa.

Komisi II DPR kembali membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Gedung DPR yang ditargetkan dapat diselesaikan pada periode 2014 ini. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan RUU ini ditargetkan selesai pada DPR periode saat ini.

“Jadi pembahasan DIM akan dilanjutkan setelah pileg pada bulan April,” kata Hakam Naja pada saat rapat dengan pakar hukum mengenai RUU Pertanahan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sumardjono dalam rapat dengan Komisi II DPR mengatakan bahwa RUU Pertanahan harus dapat memberikan batasan yang jelas terkait kepemilikan tanah.

Maria mengatakan bahwa saat ini

masih diperlukan adanya kejelasan mengenai batas maksimum atas hak kepemilikan tanah untuk keperluan usaha. Menurutnya hal tersebut diperlukan agar tidak kembali terjadi spekulasi dan alih fungsi tanah.

Maria juga mengatakan bahwa perlunya peraturan yang lebih jelas terkait restrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah. Yang diharapkan dapat dilengkapi dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh akses terhadap modal, teknologi hingga pasar bagi keperluan usaha.

Selain itu Maria juga mengingatkan bahwa negara juga harus mengatur mengenai penyediaan tanah untuk ruang publik. Menurutnya RUU Pertanahan dalam memberikan hak atas tanah juga harus mengutamakan fungsi ekologis dibandingkan fungsi sosialnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Rahardi Zakaria mengatakan penyusunan RUU Pertanahan dibuat bukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melainkan untuk memperkuatnya. Karena itu, kata dia, harus dipastikan RUU Pertanahan tidak bertentangan dengan UUPA.

Lebih lanjut, menurut Rahardi, RUU Pertanahan juga akan mengatur mengenai kepemilikan individu dan perusahaan, sehingga diharapkan konflik-konflik agraria mengenai kepemilikan tanah tidak akan terjadi lagi. “Paling tidak semangat UU ini tidak ada yang mengarah kecenderungan monopolitik perusahaan-perusahaan besar,” katanya.

Ia mengatakan RUU Pertanahan dipastikan akan mengakomodasi masalah kepemilikan tanah yang selama ini dirasa kurang maju dalam UUPA. “Di RUU ini semangatnya menyangkut kepemilikan petani, dan sebagainya. Karena kalau bicara kepemilikan jika tidak ada keadilan jadi masalah. Jadi harus diatur, karena sumber ketimpangan jadi sumber kemiskinan,” katanya.

Menurut dia, bila disahkan nanti, RUU Pertanahan akan membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menertibkan kepemilikan tanah sesuai dengan UU. Rahardi juga menyoroti mengenai kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Negara hanya menguasai, tapi BUMN itu memiliki. “Itu menjadi persoalan ketika perusahaan negara itu menjadi PT maka akan bersifat *private oriented*, apakah badan-badan tersebut masih bisa memiliki?” ujarnya. (nt), foto : nita/parle/hr.

Himpun Masukan RUU Keuangan Negara, Pansus Datangi Polri



Suasana rapat konsultasi antara Pansus RUU Keuangan Negara dengan Kapolri.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, Pansus RUU Keuangan Negara menghimpun masukan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Markas Besar Polri, dan diterima langsung oleh Kapolri Jenderal (pol) Sutarmanto dan jajarannya.

“Kunjungan ke Polri ini untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan negara, terutama tingkat kebocoran keuangan di Kepolisian. Kami ingin menyusun RUU ini lebih detail lagi. Selain itu, direncanakan kami juga akan mendatangi Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK agar nanti ketika menyusun draft RUU ini, betul-betul sempurna,” jelas Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi, Kamis (27/02).

Politisi Demokrat ini menegaskan, Tim Pansus ingin mengetahui secara detail tentang kebocoran anggaran yang sering terjadi, agar nantinya keuangan negara tidak diakali oleh para koruptor. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Kapolri.

“Dalam pertemuan, disampaikan oleh Kapolri, ada sejumlah kasus dengan modus operandi. Kapolri juga menyampaikan langkah-langkah dan

usul RUU ini, yang kira-kira dapat mencegah adanya tindakan kriminal yang merugikan negara. Kapolri memberikan masukan yang sangat bermanfaat, dan akan kami pertimbangkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal di RUU. Ini rapat yang sangat produktif, dan teman-teman Pansus sangat mengapresiasi,” tambah Achsanul.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus Bukhori. Ia mengapresiasi masukan dari Polri terkait dengan *Single Identity Number*. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan negara.

“Polri juga memberi masukan tentang pentingnya *Single Identity Number*. Ini menjadi salah satu upaya penyelesaian secara preventif dari segala sektor penyimpangan, penyimpangan terkait dengan masalah perpajakan, penyimpangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), ini adalah hal-hal yang sangat mendasar,” jelas Bukhori.

Politisi PKS ini berharap, RUU dapat memberikan suatu *guide* yang besar, terkait dengan keuangan negara. Selain itu, dapat mencerminkan aspek preventifitas masalah-masalah penyimpangan keuangan negara, bukan hanya penindakan.

“Juga akan membentuk postur keuangan negara itu. Selama ini sektor penerimaan keuangan negara itu kecil, maka dengan adanya UU Keuangan Negara ini, diharapkan penerimaan negara itu semakin besar,” tambah Anggota Komisi III ini.

Sejatinya, saat ini masih berlaku UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, masih ditemukan berbagai celah penyimpangan, sehingga muncul inisiatif dari DPR untuk merevisinya.

“Jadi ini memang merevisi UU yang sudah ada, yaitu UU No 17 tentang Keuangan Negara yang saat ini sudah *existing*. Karena kita melihat masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU ini, khususnya dalam penanganan penyimpangan keuangan. Karena masih ditemukan celah kelemahan seperti korupsi, sehingga mendorong DPR untuk merevisi UU ini,” ujar Bukhori.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Sutarmanto mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai penyelewengan keuangan negara. Di antaranya dengan tindakan preventif, represif, koordinatif, dan melibatkan peran serta masyarakat. (sf)



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake di ruang kerjanya, Senin (24/2) Foto: Andri/Parle.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima delegasi Anggota DPRD Kota Surabaya, Kamis (20/2) Foto: Andri/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena meninjau bendungan kali Oba dan Pelabuhan Ahmad Yani di Maluku Utara, Rabu (19/2) Foto: Mastur/Parle.



Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Ali Wongso meninjau infrastruktur Provinsi Sumatera Utara dan Pertemuan membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Rabu (26/2) Foto: Rizka/Parle.

